

## Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Tiara Meftahul Jannah<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: [htiaramefta@gmail.com](mailto:htiaramefta@gmail.com), [srirahayu@radenfatah.ac.id](mailto:srirahayu@radenfatah.ac.id)

(\* : coresponding author)

**Abstrak**– Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian ini dilakukan pada Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sarana prasarana yang berjalan saat ini, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta merumuskan solusi agar proses pengelolaan lebih efektif dan tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pengelolaan sarana dan prasarana telah memiliki prosedur yang jelas, namun pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang paling dominan adalah pendataan kebutuhan yang masih dilakukan secara manual, distribusi yang belum merata, serta kurang optimalnya monitoring dan evaluasi akibat keterbatasan sumber daya manusia dan belum terintegrasinya sistem informasi. Selain itu, keterlambatan proses pengadaan juga berdampak pada lambatnya pemenuhan kebutuhan alat bantu pembelajaran bagi sekolah penyelenggara pendidikan khusus. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan pengembangan sistem pendataan berbasis digital, penyederhanaan alur persetujuan, serta peningkatan koordinasi dan pelatihan bagi pengelola agar proses pengelolaan sarana prasarana lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan layanan pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Selatan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sarana Dan Prasarana, Pendidikan Khusus, PKLK, Evaluasi Layanan, Dinas Pendidikan

**Abstract**– Management of facilities and infrastructure is an essential factor in supporting the success of educational services for students with special needs. This study was conducted at the Facilities and Infrastructure Division of the Special Education and Special Services (PKLK) Department of the South Sumatera Provincial Education Office to identify the current management practices, examine existing challenges, and formulate solutions for improving effectiveness and accuracy in implementation. The research employed a descriptive qualitative method through observations, interviews, and document analysis. The findings indicate that although the management workflow already follows established procedures, several obstacles persist. The most significant issues include manual data collection, uneven distribution of resources, and limited monitoring and evaluation due to insufficient human resources and the absence of an integrated information system. Furthermore, procurement delays have contributed to slow fulfillment of educational support tools for special schools. Based on the results, this study recommends developing a digital-based data management system, simplifying approval procedures, and improving coordination and training for personnel to enhance efficiency, accountability, and sustainability in facility management. The results are expected to serve as a reference and evaluation material for improving special education service strategies in South Sumatera.

**Keywords:** Facility Management, Special Education, PKLK, Service Evaluation, Education Office

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang ditujukan untuk memberikan akses belajar yang adil bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Sarana dan prasarana ini mencakup alat bantu pembelajaran, fasilitas fisik yang ramah disabilitas, serta perlengkapan pendukung lainnya yang memungkinkan proses belajar berlangsung secara optimal. Objek dalam penelitian ini adalah Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang PKLK di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki tugas

pokok dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi. Seksi ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan khusus dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan dukungan infrastruktur yang layak dan sesuai standar.

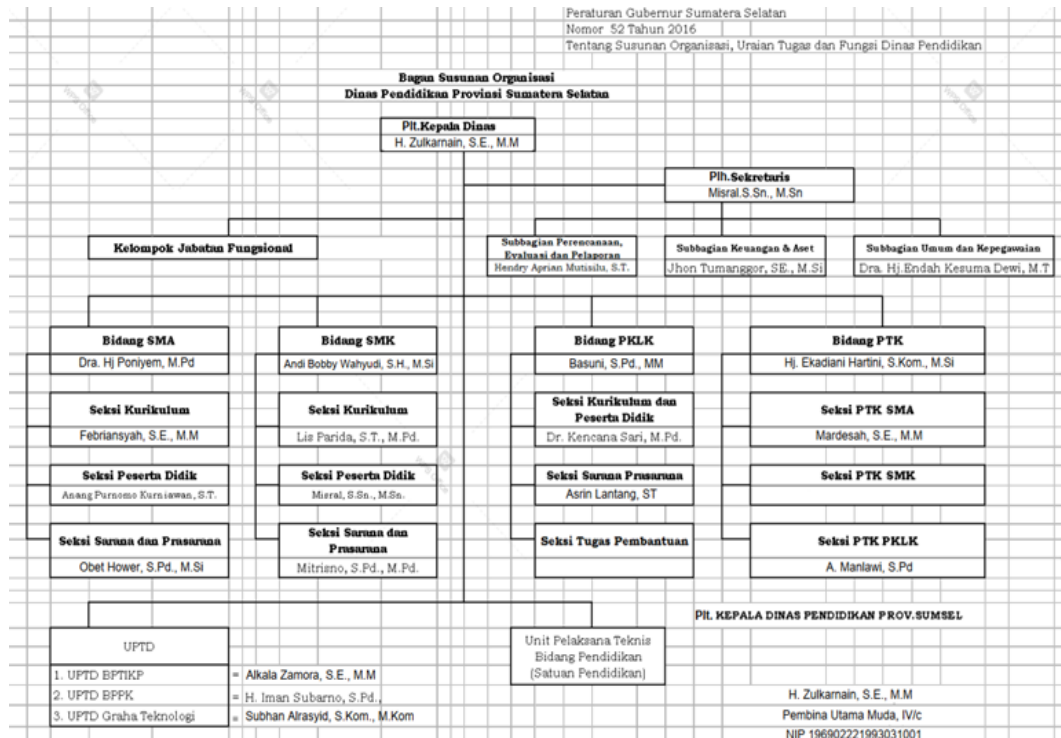
Namun dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas layanan. Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kurangnya pemerataan distribusi sarana dan prasarana, belum optimalnya perencanaan berbasis kebutuhan lapangan, serta lemahnya monitoring terhadap penggunaan dan keberfungsian fasilitas yang telah disalurkan. Selain itu, belum adanya sistem informasi pengelolaan sarana yang terintegrasi menyebabkan data kebutuhan dan ketersediaan fasilitas sulit diakses secara akurat. Sebagai solusi awal dari permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih sistematis dan berbasis data, peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, serta penguatan proses evaluasi pascapendistribusian. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan perbaikan berbasis usulan kebijakan dan perencanaan program jangka menengah agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus menjadi lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai di Seksi Sarana dan Prasarana PKLK, serta studi dokumentasi terhadap data perencanaan, distribusi, dan evaluasi fasilitas pendidikan khusus. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi nyata pengelolaan sarana prasarana di lapangan dan merumuskan rekomendasi yang tepat berdasarkan temuan yang diperoleh. Dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Berikut adalah struktur jabatan yang terkait langsung dengan lokasi kerja praktik:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan

Setiap pejabat dalam struktur ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Sumatera selatan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang dari masa kolonial Belanda, di mana pendidikan masih terbatas dan dikelola oleh pemerintah kolonial dan Kantor Pengawasan Sekolah (KPS). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah pusat mulai membentuk struktur pemerintahan di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Selatan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang Pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh kabupaten dan kota, tetapi berdasarkan Pasal 9 ayat 2, tugas-tugas tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (PEMPROV) membentuk perangkat daerah bernama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pendidikan. Gubernur Sumatera Selatan menunjuk kepala dinas pendidikan untuk mengawasi dinas tersebut. Badan ini resmi dibentuk sebagai bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah untuk menangani masalah pendidikan, sesuai dengan kebijakan desentralisasi pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan secara konsisten berupaya meningkatkan standar pendidikan di daerah tersebut dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, meningkatkan kompetensi guru, dan membangun infrastruktur pendidikan baru. Jalan Kapten A Rivai No.47, Sungai Pangeran, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan DISDIK SUMSEL adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan PEMPROV serta di bawah oleh Kementrian Pendidikan Nasional, DISDIK SUMSEL bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang berhubungan dengan Dunia Pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi dan misi yang mengacu pada tujuan pembangunan daerah dan pendidikan nasional. Visi dan misi ini menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh program dan kebijakan pendidikan, termasuk dalam layanan pendidikan khusus.

Visi:

“Terwujudnya pendidikan Sumatera Selatan yang bermutu, merata, inklusif, dan berdaya saing global.”

Misi:

1. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang dan jenis pendidikan.
2. Memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif.
4. Meningkatkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data.
5. Mengembangkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.

Visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berpihak pada kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan dari akses pendidikan, termasuk penyandang disabilitas dan anak dengan kebutuhan khusus lainnya.

## **2.3 Lokasi Instansi**

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di pusat kota Palembang, tepatnya di Jl. Kapten A. Rivai, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Lokasi ini strategis karena berada di kawasan pusat pemerintahan dan dekat dengan berbagai instansi terkait lainnya, yang memudahkan koordinasi lintas sektor.

Letak geografis kantor ini juga memberikan kemudahan akses bagi satuan pendidikan, masyarakat umum, maupun pemangku kepentingan lain yang ingin berkoordinasi atau mengakses layanan pendidikan, termasuk pengurusan kebutuhan sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Sumatera Selatan.



**Gambar 2.** Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Selatan

## 2.4 Alur Proses Bisnis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Layanan Khusus

### Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



**Gambar 3.** Alur Proses Bisnis PKLK

Diagram tersebut menggambarkan 8 fitur atau tahapan kunci yang berinteraksi dan berputar di sekitar inti proses, yaitu Pengelolaan Sarprasdik Khusus.

Berikut adalah penjelasan detail untuk setiap tahapan, berurutan searah jarum jam:

### 1. Pendataan dan Validasi Aset Sarpras

**Deskripsi:** Tahap awal untuk mendapatkan data yang akurat mengenai seluruh aset sarana dan prasarana di sekolah pendidikan khusus. Ini mencakup Visibilitas Data Unit Sekolah Khusus dan Kondisi Aset terkini.

## 2. Perencanaan Kebutuhan Ideal

**Deskripsi:** Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan standar ideal. Tujuannya adalah Realtime Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Sarpras untuk menentukan apa yang dibutuhkan dan seberapa jauh kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal.

## 3. Monitoring Pemanfaatan dan Kondisi

**Deskripsi:** Pengawasan berkelanjutan terhadap aset yang sudah ada. Menggunakan *Monitoring Dashboard* untuk melihat Kondisi Fisik dan Tingkat Utilisasi (pemanfaatan) Sarpras secara berkala.

## 4. Kontrol dan Evaluasi Standar Pelayanan

**Deskripsi:** Memastikan bahwa pengelolaan dan kondisi sarana prasarana telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ini adalah Kontrol Kepatuhan terhadap Standar Sarpras Pendidikan Khusus yang berlaku.

## 5. Evaluasi Kinerja Pengadaan/Pengadaan

**Deskripsi:** Penilaian terhadap pihak ketiga (vendor/kontraktor) yang melakukan pengadaan atau perbaikan sarana. Melibatkan Penilaian Kinerja Vendor Perbaikan/Pengadaan untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu.

## 6. Integrasi Data Keuangan & Penganggaran

**Deskripsi:** Menghubungkan kebutuhan sarpras dengan alokasi dana. Meliputi Integrasi dengan Sistem Keuangan Daerah terkait Proses Penganggaran memastikan ketersediaan dana.

## 7. Sistem Material/Aset Alih Fungsi

**Deskripsi:** Mekanisme untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang berlebih atau tidak terpakai di satu sekolah. Melibatkan Mekanisme Redistribusi atau Pengalihan Aset antar Sekolah Khusus.

## 8. Pemberdayaan SDM Pengelola Sekolah Khusus

**Deskripsi:** Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah yang bertanggung jawab langsung. Mencakup Pelatihan dan Dukungan Teknis untuk SDM Pengelola Sarpras Sekolah Khusus.

# 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PKLK

Analisis situasi khusus ini difokuskan pada Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Unit kerja ini memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan, pemerataan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di seluruh wilayah provinsi. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan khusus, peran Seksi Sarana dan Prasarana menjadi sangat strategis karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas pembelajaran di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sebagai pengendali mutu dan pengawas pemanfaatan fasilitas pendidikan agar tetap sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Secara organisasi, Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PKLK memiliki struktur yang terdiri atas beberapa staf pelaksana yang bertugas dalam bidang pendataan, administrasi, dan pelaporan. Namun, berdasarkan hasil observasi, jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya sekolah penyelenggara pendidikan khusus di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal efektivitas koordinasi, kecepatan pelayanan, serta ketepatan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana.



### 3.2 Aktivitas dan Alur Kerja Seksi Sarana dan Prasarana

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Sarana dan Prasarana PKLK mencakup tiga aspek utama dalam siklus manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, serta monitoring dan evaluasi.

#### 1. Perencanaan Kebutuhan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus. Proses ini dimulai dari pengumpulan data kebutuhan fasilitas pendidikan yang diajukan oleh sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Biasanya, data tersebut dikirimkan melalui laporan tahunan dari pihak sekolah yang memuat informasi tentang kondisi, kekurangan, dan kebutuhan fasilitas pembelajaran. Staf Seksi Sarana dan Prasarana kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menentukan skala prioritas berdasarkan urgensi, tingkat kerusakan, serta jumlah peserta didik yang membutuhkan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sistem pendataan kebutuhan masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen tertulis atau lembar kerja sederhana. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi kebutuhan menjadi lambat dan sering kali tidak sinkron dengan kondisi nyata di lapangan.

#### 2. Pengadaan dan Distribusi Sarana Prasarana

Tahap berikutnya adalah proses pengadaan dan distribusi sarana prasarana pendidikan. Pengadaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Proses ini juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahunan, yang sering kali menjadi faktor pembatas dalam pemenuhan seluruh kebutuhan sekolah. Setelah fasilitas berhasil diperoleh, Seksi Sarana dan Prasarana melakukan distribusi ke sekolah-sekolah penerima. Namun, distribusi sering kali lebih mengutamakan sekolah yang dianggap memiliki kebutuhan paling mendesak, sehingga terjadi ketidakmerataan fasilitas antar sekolah. Selain itu, keterlambatan distribusi juga menjadi permasalahan yang cukup sering muncul, terutama akibat kendala administrasi, keterlambatan pengadaan, dan keterbatasan armada pengiriman.

#### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang telah diberikan benar-benar digunakan secara optimal oleh pihak sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan, laporan pemanfaatan dari sekolah penerima, serta koordinasi dengan pengawas pendidikan khusus. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf, pelaksanaan monitoring belum berjalan maksimal karena keterbatasan jumlah pegawai dan luasnya wilayah kerja yang harus dipantau. Akibatnya, banyak fasilitas yang sudah diberikan belum terpantau efektivitas penggunaannya, sehingga sulit untuk mengetahui apakah sarana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan pengadaan.

### 3.3 Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PKLK antara lain:

1. Sistem pendataan masih manual, sehingga rentan terhadap kesalahan input, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan.
2. Distribusi fasilitas belum merata karena adanya perbedaan prioritas kebutuhan antar sekolah, sedangkan jumlah fasilitas dan anggaran terbatas.
3. Monitoring dan evaluasi belum optimal akibat keterbatasan staf dan minimnya pemanfaatan sistem pelaporan digital.
4. Minimnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data sarana prasarana, sehingga menghambat efisiensi kerja.
5. Kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas SDM, terutama dalam hal pengelolaan sistem informasi berbasis digital.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa diperlukan inovasi dan modernisasi sistem manajemen sarana dan prasarana, agar proses kerja dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan transparan.

## 4. IDENTIFIKASI DAN PRIORITAS MASALAH

### 4.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan beberapa masalah utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus. Permasalahan yang paling menonjol adalah pendataan kebutuhan yang masih dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan, keterlambatan, dan duplikasi data. Selain itu, distribusi fasilitas belum merata, karena prioritas lebih banyak diberikan kepada sekolah tertentu, sementara sekolah lain masih kekurangan alat bantu pembelajaran. Masalah lain yang muncul adalah monitoring dan evaluasi yang belum optimal akibat keterbatasan jumlah pegawai dan belum adanya sistem pelaporan berbasis digital. Proses pengadaan dan distribusi fasilitas juga sering mengalami keterlambatan karena kendala administrasi dan anggaran. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi masih minim, sehingga proses kerja belum berjalan efisien. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua hal menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki, yaitu: pertama, pengembangan sistem pendataan berbasis digital agar prosesnya lebih cepat, akurat, dan transparan; dan kedua, pemerataan distribusi sarana prasarana agar seluruh sekolah penyelenggara pendidikan khusus mendapatkan fasilitas secara adil sesuai kebutuhan. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana prasarana pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Selatan.

### 4.2 Prioritas Masalah

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Perbaikan Sistem Pendataan Sarana dan Prasarana

Proses pendataan kebutuhan sarana dan prasarana masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen tertulis, sehingga sering menimbulkan keterlambatan, kesalahan input, dan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pendataan berbasis digital agar proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

#### 2. Pemerataan Distribusi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus

Penyaluran fasilitas pendidikan masih belum merata karena prioritas distribusi lebih sering diberikan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap mendesak kebutuhannya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antar sekolah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan distribusi yang lebih proporsional dan berbasis pada data kebutuhan aktual agar seluruh sekolah penyelenggara pendidikan khusus memperoleh fasilitas secara adil dan sesuai standar pelayanan minimal.

Dua prioritas masalah tersebut menjadi fokus utama yang perlu segera ditangani agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

**Tabel 1.** Prioritas Masalah

No	Masalah	Dampak	Tingkat Prioritas	Solusi yang diusulkan
1	Keterlambatan proses persetujuan pengadaan sarana dan prasarana khusus	Keterlambatan pemenuhan kebutuhan alat bantu belajar dan fasilitas khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; menghambat kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan	Tinggi	Menyusun alur persetujuan pengadaan yang lebih efisien dengan penggunaan sistem persetujuan digital internal Dinas, sehingga verifikasi permintaan dapat dilakukan secara cepat dan real-time, terutama untuk kebutuhan mendesak

2	Belum optimalnya integrasi administrasi pengadaan dan pelaporan	Administrasi pengadaan dan pencatatan sarana prasarana (BAPB, BASTP, BAP, laporan kegiatan) masih manual, memperpanjang waktu, meningkatkan risiko kesalahan data, dan keterlambatan pelaporan	Tinggi	Meningkatkan integrasi sistem pengelolaan sarana dan prasarana dengan modul administrasi digital, menambahkan fitur unggah dokumen, format laporan standar, dan disertai pelatihan intensif bagi staf pengelola sarana dan prasarana layanan khusus
3	Kendala teknis operasional administrasi dan pencatatan	Sarana dan prasarana yang diterima tidak sesuai kebutuhan, perlu perbaikan atau tambahan, memperpanjang waktu pemenuhan dan mengganggu kegiatan belajar	Sedang	Meningkatkan keandalan sistem administrasi internal, menambahkan validasi data otomatis untuk mencegah kesalahan input, serta melakukan pengujian dan pemeliharaan rutin sistem agar operasional berjalan lancar

#### 4.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi pada proses pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi aktual, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan, tanpa memanipulasi variabel atau menciptakan kondisi buatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

##### 1. Observasi Langsung

Pengamatan dilakukan terhadap alur proses pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus, mulai dari tahap pengajuan kebutuhan oleh sekolah hingga tahap distribusi dan penerimaan di sekolah yang bersangkutan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai prosedur yang berlaku, interaksi antar unit di Dinas Pendidikan, serta permasalahan yang muncul di lapangan.

**Tabel 2.** Observasi langsung

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
16 juni 2025	Observasi awal alur proses pengelolaan sarana dan prasarana	Mengamati proses pengajuan, persetujuan, dan distribusi sarana dan prasarana layanan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
17 juni 2025	Studi dokumentasi	Menelaah dokumen terkait alur pengelolaan sarana dan prasarana, struktur organisasi Seksi Sarana dan Prasarana Layanan Khusus, serta SOP internal Dinas Pendidikan.
20 juni 2025	Wawancara dengan staf pengelola sarana dan prasarana	Diskusi mengenai kendala administrasi, keterlambatan persetujuan, dan efektivitas sistem pengelolaan sarana dan prasarana di layanan khusus.
10 juli 2025	Analisis data awal	Mereduksi hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen berdasarkan indikator penelitian, untuk memperoleh gambaran permasalahan dan potensi perbaikan.



## 2. Wawancara

Dilakukan dengan staf pengelola sarana dan prasarana layanan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan distribusi sarana serta prasarana. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman mengenai prosedur operasional, kendala yang dihadapi, koordinasi antar unit, serta potensi perbaikan yang dapat diterapkan.

**Tabel 3.** Wawancara

No	Fokus Wawancara	Pertanyaan Wawancara
1	Proses Pengajuan dan Persetujuan	Bagaimana mekanisme pengajuan dan persetujuan sarana dan prasarana untuk layanan khusus di Dinas Pendidikan?
2	Kendala Operasional	Apa saja kendala yang sering muncul dalam proses pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana?
3	Akurasi Pemenuhan	Seberapa sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah atau jenis sarana/prasarana yang diajukan dengan yang diterima di sekolah?
4	Koordinasi dengan Sekolah	Bagaimana koordinasi dilakukan antara Dinas dan sekolah penerima saat terjadi perubahan kebutuhan atau keterbatasan stok?
5	Dokumentasi dan Transparansi	Apakah sistem administrasi yang ada sudah cukup mendukung pencatatan dan transparansi pengadaan? Apa yang perlu ditingkatkan?
6	Efektivitas Sistem	Bagaimana penggunaan sistem administrasi saat ini mempengaruhi efektivitas kerja staf pengelola dibandingkan metode sebelumnya?
7	Rekomendasi Perbaikan	Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan kelancaran proses pengelolaan sarana dan prasarana?

## 3. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen internal yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus. Dokumen yang ditelaah meliputi alur proses pengajuan dan distribusi sarana/prasarana, struktur organisasi Seksi Sarana dan Prasarana, serta pedoman atau SOP terkait administrasi pengadaan. Tujuan studi dokumentasi ini adalah untuk memahami keterkaitan antarunit dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana, serta memastikan deskripsi alur yang dianalisis sesuai dengan praktik yang diterapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif interaktif, mengacu pada model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: pemilahan data (reduksi), penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Tahapan ini diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus.

### 5. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi dari hasil wawancara staf pengelola, observasi lapangan, serta dokumen administrasi pengadaan. Fokusnya pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kecepatan pemenuhan sarana/prasarana, kecocokan sarana / prasarana dengan kebutuhan, koordinasi antarunit, dan kelengkapan dokumentasi. Dengan pemilahan ini, data yang kurang relevan atau bersifat umum disaring sehingga tersisa informasi yang menggambarkan masalah utama dan hambatan operasional.

### 6. Penyajian Data (*Data Display*)

Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel ringkasan, dan diagram alur proses. Penyajian ini memudahkan pemetaan pola hubungan antarindikator efektivitas. Contohnya, kendala dalam persetujuan berlapis dicatat pada indikator kecepatan pemenuhan, sedangkan masalah ketidaksesuaian sarana/prasarana dicatat pada indikator kecocokan pemenuhan. Penyajian data ini membantu pembaca membandingkan kondisi ideal dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

#### **7. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Data yang telah disusun dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, terutama mengenai rekomendasi perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus. Verifikasi dilakukan melalui diskusi lanjutan dengan staf pengelola untuk memastikan interpretasi sesuai dengan kondisi nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun administrasi internal telah mendukung transparansi dan dokumentasi, masih diperlukan peningkatan pada kecepatan pemenuhan, ketepatan pemenuhan sarana/prasarana, dan efisiensi administrasi, agar layanan pendidikan khusus berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, proses pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki alur yang jelas, dimulai dari pengajuan kebutuhan oleh sekolah, verifikasi oleh staf pengelola, hingga persetujuan kepala seksi terkait, dan akhirnya distribusi ke sekolah. Meskipun mekanisme ini formal dan terdokumentasi, banyaknya tahapan persetujuan menyebabkan proses pemenuhan kebutuhan menjadi lambat, terutama pada kasus kebutuhan mendesak. Selain itu, ketidaksesuaian antara jumlah atau jenis sarana/prasarana yang diterima dengan yang diajukan masih terjadi, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan stok dan komunikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara Dinas, sekolah, dan penyedia barang. Sistem administrasi internal yang digunakan telah meningkatkan transparansi karena dokumen pengadaan dapat dilacak, namun sebagian dokumen seperti BAPB, BASTP, dan BAP masih disusun secara manual karena integrasi sistem belum optimal. Hal ini mempengaruhi efisiensi administrasi, meskipun secara keseluruhan sistem digital yang ada telah membantu mempermudah pemantauan dan pencatatan pengadaan. Koordinasi antarunit dan sekolah juga menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi perubahan kebutuhan atau stok kosong, sehingga respon terhadap kebutuhan menjadi kurang cepat jika tidak ditindaklanjuti secara manual. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana layanan khusus masih dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kecepatan pemenuhan, ketepatan sarana/prasarana, efisiensi administrasi, dan koordinasi antarunit. Untuk meningkatkan kualitas layanan, disarankan dilakukan digitalisasi penuh dokumen pengadaan, penyederhanaan alur persetujuan, dan penguatan integrasi data antara Dinas, sekolah, dan unit distribusi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses, meminimalkan ketidaksesuaian, dan meningkatkan transparansi serta efektivitas administrasi, sehingga layanan pendidikan khusus dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

### **REFERENCES**

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2020). *Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prihatin, E. (2020). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, A. (2021). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 123–135.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar dan Menengah*.
- Suparlan, S. (2022). *Manajemen Pendidikan Inklusif: Strategi dan Implementasi di Sekolah Luar*



- Biasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Laporan Tahunan Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)*. Palembang: Disdik Sumsel.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Kebijakan, Inovasi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.